



## **ANALILIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH DASAR NEGERI KENEP 01 SUKOHARJO**

**Yusuf Nurrahman<sup>1\*</sup>, Arif Fahrudin<sup>2</sup>, Roza Cyintia Salwa Azhar<sup>3</sup>, Arif Rumiyadi<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

<sup>4</sup> Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

\*E-mail: [yusufnurohman04@gmail.com](mailto:yusufnurohman04@gmail.com)

### **Abstrak**

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Namun, implementasinya pada sekolah dengan jumlah siswa sedikit sering menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan dana operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan dana BOS, hambatan yang dihadapi, serta solusi dalam optimalisasi penggunaannya di sekolah kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka. Hasil penelitian di SD Negeri Kenep 01 Sukoharjo menunjukkan bahwa perencanaan dana BOS dilakukan melalui pembentukan tim manajemen, penyusunan APBS, serta sosialisasi dengan komite sekolah. Pelaksanaan penyaluran dana berlangsung dalam dua tahap setiap tahun dan pengelolaan keuangan menggunakan ARKAS untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Meskipun terdapat tantangan seperti keterlambatan pencairan dana dan keterbatasan sumber daya manusia, sekolah mampu mengoptimalkan penggunaan dana untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pengembangan sarana prasarana, serta administrasi sekolah. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas manajemen sekolah, partisipasi pemangku kepentingan, serta penguatan sistem pengawasan agar dana BOS dapat dimanfaatkan secara efektif.

**Kata Kunci:** Dana BOS, ARKAS, Sekolah Kecil, Mutu Pendidikan.

### **PENDAHULUAN**

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan merata. Dana BOS diberikan kepada setiap satuan pendidikan dengan tujuan utama membantu pendanaan biaya operasional nonpersonalia agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Melalui program ini, diharapkan tidak ada hambatan bagi sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh peserta didik.

Namun, implementasi pengelolaan dana BOS di lapangan tidak selalu berjalan ideal, terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa yang relatif sedikit. Berdasarkan ketentuan, besaran dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. Kondisi ini menyebabkan sekolah dengan jumlah siswa sedikit memperoleh dana yang terbatas, sehingga menghadapi tantangan dalam memenuhi berbagai kebutuhan operasional sekolah, seperti pembiayaan kegiatan pembelajaran, perawatan sarana dan prasarana, pengembangan kompetensi guru, hingga penyediaan alat pembelajaran yang memadai.

Keterbatasan dana tersebut menuntut sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan secara lebih cermat dan kreatif agar tetap dapat menjalankan program pendidikan secara optimal. Di sisi lain, sekolah juga dituntut untuk



tetap mematuhi prinsip pengelolaan dana BOS yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis BOS yang berlaku.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam hal kompetensi manajerial dan administrasi keuangan di sekolah kecil juga menjadi faktor penghambat efektivitas implementasi BOS. Kepala sekolah dan bendahara BOS sering kali harus merangkap berbagai tugas, sehingga potensi terjadinya kesalahan administrasi atau keterlambatan pelaporan cukup tinggi.

Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi pengelolaan dana BOS pada sekolah dengan jumlah siswa sedikit menjadi penting dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana strategi pengelolaan dana dilakukan, kendala yang dihadapi, serta solusi atau inovasi yang dapat diterapkan agar dana BOS tetap dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara penyajian data yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dan studi Pustaka yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Menurut Susanti dan Nafi'ah (2022) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi yang kemudian hasilnya dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan berupa uraian yang mendalam yaitu tentang perencanaan, pelaksanaan dan juga pelaporan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan melalui wawancara langsung ke SD Negeri Kenep 01 Sukoharjo. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti menggunakan hasil penelitian yang sudah pernah ada seperti jurnal, artikel dan lainnya. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kenep 01 Sukoharjo yang beralamat di Desa Kedunggudel Kecamatan Kenep Kabupaten Sukoharjo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dana BOS merupakan salah satu unsur pokok yang mampu menopang pendidikan formal pada setiap satuan pendidikan. Dengan terbatasnya jumlah peserta didik yang terdaftar, maka dana yang didapatkan juga terbatas. Keterbatasan itulah yang mendorong fungsi manajemen keuangan yang efektif agar tujuan penyaluran dana BOS bisa terealisasi secara maksimal. Manajemen harus dilaksanakan secara menyeluruh, efisien, namun tetap menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Penelitian ini memfokuskan pengaialan data pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kendala, dan strategi serta inovasi pelaksanaan dana BOS. Lima tahapan ini diambil datanya supaya proses penyaluran dana BOS di SDN Kenep 01 Sukoharjo mampu terdata dengan tuntas sehingga menjadikan interpretasi yang lebih jelas tentang konsep dan simpulan pada penelitian yang dituju.

Pada pembahasan, hasil temuan akan dibahas dari aspek pengelolaan dana BOS yang baik tersebut mampu berdampak baik kepada peningkatan fasilitas, kualitas SDM, dan kinerja sekolah yang lebih baik dalam penyelenggaraan fasilitas pembelajaran, kesejahteraan guru, output, dan outcomenya.

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Perencanaan Pengelolaan Dana BOS**



Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan dana BOS di SD Negeri Kenep 01 Sukoharjo dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dan partisipatif. Sekolah membentuk Tim Manajemen BOS yang terdiri atas kepala sekolah, bendahara, perwakilan guru, dan komite sekolah. Tim ini bertanggung jawab dalam penyusunan APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) dan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

Perencanaan tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi diri sekolah yang meliputi analisis kebutuhan, prioritas pengeluaran, serta identifikasi kendala yang mungkin dihadapi selama satu tahun anggaran. Proses ini juga melibatkan komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Dari hasil wawancara dan dokumentasi, diketahui bahwa sebelum penyusunan RKAS dilakukan, pihak sekolah melaksanakan evaluasi diri sekolah (EDS) untuk mengetahui kondisi aktual. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan kondisi nyata sekolah terhadap standar nasional pendidikan, sebagaimana panduan dari Kemdiknas dan Kemenag (2011). Berdasarkan evaluasi tersebut, sekolah dapat merumuskan prioritas utama yang memerlukan pendanaan BOS, seperti perawatan sarana prasarana, penyediaan bahan ajar, serta dukungan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.

Secara ilmiah, proses perencanaan yang berbasis pada evaluasi diri sekolah memperlihatkan adanya hubungan langsung antara efektivitas perencanaan dan akurasi penggunaan anggaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Sulastris (2020), perencanaan yang baik menjadi faktor determinan dalam memastikan dana BOS digunakan sesuai kebutuhan nyata satuan pendidikan. Temuan di SD Negeri Kenep 01 mendukung teori tersebut, di mana keterlibatan guru dan komite dalam proses perencanaan terbukti dapat mengurangi potensi ketidaktepatan anggaran serta meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap dana publik.

Dengan demikian, perencanaan yang partisipatif dan berbasis data menjadi temuan ilmiah utama dalam konteks sekolah kecil. Proses ini memperlihatkan bahwa meskipun SD Negeri Kenep 01 memiliki keterbatasan sumber daya, namun melalui mekanisme partisipatif, sekolah mampu menyesuaikan kebutuhan dengan ketersediaan anggaran secara efektif.

## **2. Pelaksanaan dan Penyaluran Dana BOS**

Pelaksanaan dan penyaluran dana BOS di SD Negeri Kenep 01 Sukoharjo dilakukan dalam dua tahap setiap tahun anggaran, masing-masing mencakup periode enam bulan. Pada tahun 2025, sekolah menerima total dana BOS sebesar Rp59.220.000, dengan 63 siswa penerima dan alokasi per siswa sebesar Rp940.000. Penyaluran dana dilakukan melalui bank penyalur pemerintah dan disesuaikan dengan data jumlah peserta didik yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

Proses pencairan dana mengikuti mekanisme pengajuan dan verifikasi melalui sistem ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). ARKAS berfungsi sebagai sistem informasi manajemen yang mengintegrasikan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan dana BOS secara digital. Penggunaan ARKAS terbukti meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi risiko kesalahan pembukuan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Handayani (2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan ARKAS secara optimal dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah. Sekolah yang mengintegrasikan ARKAS dalam seluruh siklus manajemen keuangan menunjukkan penurunan signifikan terhadap tingkat kesalahan input dan keterlambatan laporan.

Namun, hasil observasi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan dana BOS di SD Negeri Kenep 01 masih dipengaruhi oleh keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah. Faktor ini berdampak langsung pada ritme pelaksanaan kegiatan pembelajaran, terutama kegiatan yang



membutuhkan biaya rutin seperti langganan daya dan jasa, kegiatan ekstrakurikuler, serta pengadaan bahan ajar.

Fenomena keterlambatan ini dapat dijelaskan secara ilmiah melalui teori manajemen keuangan publik, di mana kelancaran arus kas (cash flow) menjadi elemen penting dalam menjaga keberlangsungan layanan publik. Ketika arus dana dari pemerintah pusat atau daerah tersendat, sekolah harus melakukan penjadwalan ulang kegiatan (budget adjustment) agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan tanpa mengganggu rencana kerja tahunan.

Selain itu, sekolah melakukan mekanisme pengendalian internal melalui konfirmasi berkala kepada Dinas Pendidikan sebelum proses pencairan. Bendahara BOS tidak dapat mengambil dana tanpa persetujuan kepala sekolah dan tanda tangan resmi sesuai prosedur keuangan. Prosedur ini merupakan bentuk akuntabilitas internal, yang memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki dasar hukum dan dokumentasi yang jelas.

### **3. Pengawasan dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS**

Tahapan pengawasan dan akuntabilitas merupakan komponen penting dalam menjamin transparansi dan mencegah penyimpangan penggunaan dana publik. Di SD Negeri Kenep 01 Sukoharjo, pengawasan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

Pengawasan internal melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah. Kepala sekolah berfungsi sebagai pengendali utama yang memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan RKAS dan juknis BOS. Komite sekolah, sebagai representasi masyarakat, berperan dalam memberikan pertimbangan serta memantau kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan sekolah.

Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo melalui pemeriksaan berkala terhadap dokumen administrasi dan laporan keuangan. Selain itu, sekolah wajib melakukan publikasi laporan penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah agar dapat diakses oleh masyarakat secara transparan.

Temuan ini mendukung penelitian Rahmawati (2020) yang menegaskan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator utama efektivitas pengelolaan dana BOS. Sekolah yang secara rutin melakukan pelaporan terbuka kepada masyarakat menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dan memiliki risiko penyimpangan yang lebih rendah.

Secara ilmiah, mekanisme pengawasan berlapis ini mencerminkan penerapan prinsip good governance dalam pendidikan. Transparansi publik dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor eksternal yang memperkuat kontrol sosial terhadap pengelolaan dana publik di tingkat satuan pendidikan.

### **4. Kendala dalam Implementasi BOS**

Meskipun mekanisme pengelolaan dana BOS telah dijalankan sesuai regulasi, terdapat sejumlah kendala yang masih dihadapi SD Negeri Kenep 01 Sukoharjo. Kendala utama adalah terbatasnya jumlah dana akibat jumlah siswa yang relatif sedikit. Karena sistem alokasi dana BOS berbasis jumlah peserta didik, sekolah kecil secara struktural menerima dana yang jauh lebih rendah dibandingkan sekolah besar. Kondisi ini menyebabkan sekolah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasional secara optimal, seperti pemeliharaan fasilitas, penyediaan bahan ajar, serta pengembangan kompetensi guru.

Selain itu, ditemukan pula keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah yang menyebabkan kegiatan sekolah tertunda. Kendala lain adalah terbatasnya kemampuan administrasi dan akuntansi bendahara BOS, yang menyebabkan proses input data dan pelaporan di ARKAS memerlukan waktu lebih lama.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Pratiwi (2021) yang mengungkapkan bahwa sekolah kecil sering menghadapi tantangan struktural berupa minimnya pendanaan dan kapasitas manajerial. Menurut teori resource-based view (RBV), keterbatasan sumber daya manusia dan finansial akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi manajerialnya.



Dalam konteks ini, SD Negeri Kenep 01 menghadapi keterbatasan ganda, baik dari sisi kuantitas dana maupun kualitas SDM pengelola.

### **5. Strategi dan Inovasi Pengelolaan Dana BOS**

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, SD Negeri Kenep 01 Sukoharjo mengembangkan berbagai strategi adaptif dan inovatif dalam mengelola dana BOS. Strategi utama yang dilakukan antara lain:

- A. Optimalisasi ARKAS sebagai alat perencanaan dan pelaporan yang efisien. Sekolah meningkatkan kemampuan teknis bendahara melalui pelatihan internal agar mampu memanfaatkan fitur ARKAS secara maksimal.
- B. Perencanaan berbasis prioritas kebutuhan, yaitu mengutamakan kegiatan yang mendukung pembelajaran langsung dan keberlangsungan operasional sekolah.
- C. Peningkatan partisipasi komite sekolah dan guru dalam perencanaan agar setiap pengeluaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan disetujui bersama.
- D. Pengawasan internal yang lebih intensif, dengan melakukan evaluasi bulanan terhadap penggunaan dana dan penyusunan laporan sementara sebelum pelaporan akhir.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Yuliani & Hidayat (2022) yang menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan (stakeholder collaboration) berperan penting dalam memperkuat efektivitas pengelolaan BOS, terutama di sekolah kecil. Dengan memanfaatkan kolaborasi dan transparansi, SD Negeri Kenep 01 mampu menjaga keberlanjutan program pendidikan meskipun dalam kondisi sumber daya terbatas.

Dari perspektif ilmiah, strategi adaptif ini menunjukkan adanya transformasi manajerial berbasis kebutuhan lokal. Sekolah tidak hanya berperan sebagai penerima dana, tetapi juga sebagai pengelola yang kreatif dalam menyesuaikan regulasi nasional dengan kondisi riil di lapangan.

### **Pembahasan**

Pengelolaan dana BOS di SDN Kenep 01 Sukoharjo dilaksanakan dengan menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi. Usaha sekolah untuk mengaktualisasikannya adalah dengan melibatkan tim pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dana BOS ini dikelola oleh tim dengan pendampingan kepala sekolah, komite sekolah, serta dinas pendidikan sehingga dimulai dari proses perencanaan telah terawasi dan terbimbing.

Implementasi dana BOS di SDN Kenep 01 Sukoharjo sudah teratur dengan baik. Namun dalam tahapannya masih memiliki kendala berupa keterlambatan dalam penyaluran dana BOS. Dana BOS yang seharusnya disalurkan pada bulan-bulan tertentu, masih mengalami pergeseran dari jadwal awalnya. Keterlambatan inilah yang kemudian mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan dana BOS pada sistem ARKAS. Kendala yang lain adalah minimnya jumlah murid yang berakibat kepada minimnya dana BOS, yang akhirnya pembenahan sarana prasarana, pengadaan fasilitas pendidikan, dan lain-lain harus diprioritaskan pada aspek yang paling urgen untuk segera dieksekusi.

Dengan adanya kendala tersebut, maka dibutuhkan strategi dan inovasi dalam penyaluran dana BOS. Inovasi yang dilakukan di SDN Kenep 01 Sukoharjo sudah diterapkan dengan optimalisasi ARKAS, perencanaan berbasis kebutuhan, peningkatan partisipasi pengelola sekolah, serta pengawasan internal yang lebih intensif.

### **SIMPULAN (PENUTUP)**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ilmiah mengenai pengelolaan dana BOS di SD Negeri Kenep 01 Sukoharjo, diperoleh sejumlah temuan ilmiah yang signifikan dan menjawab hipotesis penelitian. Secara umum, pengelolaan dana BOS di sekolah kecil menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi apabila didukung oleh perencanaan partisipatif, pemanfaatan sistem digital (ARKAS), serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)





pengelola dan mekanisme pengawasan berlapis.

Temuan ilmiah pertama menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana BOS tidak semata-mata ditentukan oleh besaran dana yang diterima, melainkan oleh kualitas tata kelola dan strategi adaptif sekolah dalam mengoptimalkan sumber daya terbatas. Fenomena ini dapat dijelaskan secara saintifik melalui teori resource constraint management, di mana organisasi dengan sumber daya terbatas cenderung mengembangkan sistem efisiensi dan inovasi internal yang lebih kuat. Dengan demikian, keterbatasan dana justru memicu munculnya pola manajemen yang lebih rasional, hemat, dan berbasis prioritas kebutuhan riil sekolah.

Temuan ilmiah kedua adalah pengaruh signifikan perencanaan partisipatif terhadap akurasi alokasi dana dan akuntabilitas publik. Keterlibatan kepala sekolah, guru, dan komite dalam penyusunan RKAS terbukti meningkatkan transparansi dan legitimasi keputusan keuangan. Secara ilmiah, fenomena ini mendukung prinsip participatory governance, yang menegaskan bahwa partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Hasil ini konsisten dengan temuan Sulastris (2020) dan Yuliani & Hidayat (2022) yang menunjukkan bahwa partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam pengelolaan BOS memperkuat kepercayaan publik dan mengurangi potensi penyimpangan anggaran.

Temuan ilmiah ketiga berkaitan dengan peran teknologi informasi, khususnya ARKAS, yang terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan dana BOS. Pemanfaatan sistem ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan pencatatan serta memperkuat akuntabilitas vertikal (antara sekolah dan dinas pendidikan). Dari sudut pandang ilmiah, hal ini sejalan dengan konsep digital accountability system, di mana penggunaan teknologi informasi dalam sektor publik berfungsi sebagai instrumen kontrol dan transparansi keuangan. Hasil penelitian ini menguatkan temuan Handayani (2021) bahwa digitalisasi sistem pelaporan keuangan di sekolah berkontribusi besar terhadap peningkatan kepercayaan publik dan efisiensi operasional.

Temuan ilmiah keempat adalah adanya kendala struktural dan operasional yang bersifat sistemik, seperti keterlambatan penyaluran dana, keterbatasan dana akibat jumlah siswa sedikit, dan kurangnya kompetensi administrasi bendahara. Secara saintifik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori public financial dependency, di mana satuan pendidikan kecil yang sangat bergantung pada transfer pemerintah lebih rentan terhadap fluktuasi kebijakan fiskal dan keterlambatan birokrasi. Kondisi ini menyebabkan pola adaptasi yang berbeda dibanding sekolah besar. Temuan ini juga selaras dengan hasil penelitian Pratiwi (2021) yang menemukan bahwa keterlambatan dana dan rendahnya kapasitas SDM menjadi faktor penghambat efektivitas BOS di daerah pedesaan.

Temuan ilmiah kelima menunjukkan bahwa strategi adaptif yang dikembangkan sekolah kecil dapat menciptakan resiliensi institusional (institutional resilience) dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. SD Negeri Kenep 01 Sukoharjo berhasil mempertahankan keberlangsungan pembelajaran melalui strategi hemat-prioritas, efisiensi pembelanjaan, serta pengawasan internal kolaboratif antara kepala sekolah dan komite. Fenomena ini mendukung teori adaptive governance, di mana lembaga publik dengan tingkat otonomi tinggi dapat menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi lokal secara fleksibel tanpa mengurangi kepatuhan terhadap regulasi. Strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknis, tetapi juga menjadi model konseptual bagi pengelolaan dana publik di lembaga kecil lainnya.

Secara saintifik, tren yang muncul dari penelitian ini menunjukkan kecenderungan positif antara tingkat partisipasi dan efektivitas pengelolaan dana BOS, serta hubungan kuat antara kemampuan adaptif lembaga dan efisiensi keuangan. Dengan kata lain, semakin tinggi partisipasi dan kapasitas adaptif sekolah, semakin besar pula kemampuan sekolah dalam



menjaga efektivitas BOS meski di bawah keterbatasan dana. Tren ini memperlihatkan bahwa variabel “jumlah dana” bukan faktor tunggal yang menentukan mutu tata kelola BOS; melainkan kombinasi antara manajemen partisipatif, literasi keuangan digital, dan kepemimpinan adaptif.

Hasil-hasil ini secara langsung menjawab hipotesis penelitian, yaitu bahwa efektivitas pengelolaan dana BOS akan meningkat apabila didukung oleh (1) perencanaan partisipatif, (2) pemanfaatan ARKAS, (3) peningkatan kapasitas SDM pengelola, dan (4) sistem pengawasan berlapis. Keempat faktor tersebut terbukti memiliki kontribusi ilmiah yang saling melengkapi dalam membangun sistem keuangan sekolah yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain memperkuat temuan penelitian terdahulu, studi ini juga memberikan kebaruan ilmiah (novelty) dalam konteks penelitian pengelolaan BOS, yaitu fokus pada sekolah dengan jumlah siswa sangat sedikit yang selama ini kurang mendapat perhatian akademik. Kebaruan ini penting karena memperlihatkan bahwa praktik-praktik adaptif dan inovatif pada sekolah kecil dapat menjadi model alternatif pengelolaan keuangan publik mikro di sektor pendidikan dasar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan secara ilmiah bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah kecil tidak hanya persoalan teknis pendanaan, melainkan persoalan manajemen adaptif dan tata kelola kolaboratif. Faktor manusia (human capital) dan sistem digital menjadi dua elemen utama yang memediasi keterbatasan struktural agar tidak menurunkan kualitas layanan pendidikan. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya kebijakan BOS yang lebih adaptif dan berkeadilan, terutama dalam formula alokasi dana bagi sekolah dengan jumlah siswa sedikit serta program pelatihan berkelanjutan bagi bendahara dan kepala sekolah di bidang manajemen keuangan digital.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori good governance in educational finance, bahwa transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai mekanisme ilmiah yang mampu meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik di lingkungan pendidikan dasar. Dengan pendekatan ilmiah ini, hasil penelitian tidak hanya relevan bagi SD Negeri Kenep 01 Sukoharjo, tetapi juga memiliki implikasi luas bagi perumusan kebijakan BOS di tingkat nasional, terutama dalam mewujudkan pemerataan dan keberlanjutan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih banyak disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan artikel ilmiah ini, sehingga artikel ini bisa terbit dan terselesaikan dengan baik. Besar harapan semoga artikel penelitian ini bisa menebarkan manfaat bagi peneliti yang lain, dan dapat menyumbangkan hasanah ilmu pengetahuan dan konsep manajemen pendidikan di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anra, R. (2025). *Akuntabilitas transparansi pengelolaan BOS dalam optimalisasi mutu pendidikan*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 10(2). <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i2.632>
- Arifin, M. (2023). *Efektivitas pelaporan penggunaan dana BOS menggunakan aplikasi ARKAS pada Sekolah Menengah Atas Yapris Biak*. Ejournal Nusantara Global, 5(3). <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i3.3282>
- Hasibuan, S., & Siregar, R. (2022). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 6 Medan*. E-Jurnal Kampus Akademik. (Diakses melalui platform E-Jurnal Kampus Akademik).



- Kusuma, D., & Rahmawati, L. (2021). *Analisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMAN 12 Kota Pekanbaru*. Jurnal Universitas 45 Surabaya, 4(1). <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.852>
- Sari, A. P., & Setiawan, H. (2022). *Pengaruh efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi sekolah terhadap pengelolaan Dana BOS — fokus pada sekolah dasar*. JIEMAP: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan, 4(2). <https://doi.org/10.53088/jikab.v4i2.124>
- Susanti, P., & Nafi'ah, B. (2022). *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di SD Negeri Sendangharjo Ngasem Kabupaten Bojonegoro*. 123–132.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah*. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. (PDF tersedia melalui repositori Kemendikbudristek).